



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah unsur penunjang Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

8. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra BAPPELITBANGDA adalah dokumen perencanaan BAPPELITBANGDA untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Renja BAPPELITBANGDA adalah dokumen perencanaan BAPPELITBANGDA untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BAPPELITBANGDA

Pasal 2

- (1) Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BAPPELITBANGDA dalam menyusun Renja BAPPELITBANGDA.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra BAPPELITBANGDA disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala BAPPELITBANGDA wajib melaksanakan Renstra BAPPELITBANGDA dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra BAPPELITBANGDA.
- (2) Kepala BAPPELITBANGDA menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi dan penunjang urusan Perencanaan serta Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2027, Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra BAPPELITBANGDA, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra BAPPELITBANGDA harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA dan Renja BAPPELITBANGDA, BAPPELITBANGDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum BAPPELITBANGDA/lintas Renstra BAPPELITBANGDA, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra BAPPELITBANGDA memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap BAPPELITBANGDA yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja BAPPELITBANGDA Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 106

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran strategis daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. PP Nomor 8 Tahun 2008 dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENSTRA BAPPELITBANGDA Tahun 2024 - 2026 bersifat khusus karena disusun selain berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dokumen RENSTRA atau Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama periode 5 (lima) tahun, tetapi memperhatikan Inmendagri 52 Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 maka perodesasi Dokumen RENSTRA PD menjadi 3 tahun yaitu Tahun 2024-2026.

Perubahan perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya upaya Pemerintah untuk mengadakan PEMILU Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024, dan start untuk perencanaan menjadi serentak di Seluruh Indonesia..

Renstra BAPPELITBANGDA berfungsi sebagai pedoman penyusunan kebijakan BAPPELITBANGDA, acuan dalam pembuatan renja BAPPELITBANGDA, menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi.

Renstra BAPPELITBANGDA sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan nasional. Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang utuh, maka Renstra BAPPELITBANGDA disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah Tahun 2024 - 2026.

Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 disusun untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target yang terencana dan terukur. Renstra BAPPELITBANGDA disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan akurasi perencanaan diiringi dengan konsistensi pelaksanaannya sehingga diharapkan akan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 - 2029;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan;
21. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan periode 2024-2026.

Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BAPPELITBANGDA, Mitra BAPPELITBANGDA dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA, dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab BAPPELITBANGDA;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan serta Sub Kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.4 Kedudukan dan Keterhubungan serta Tata Cara Penyusunan Dokumen

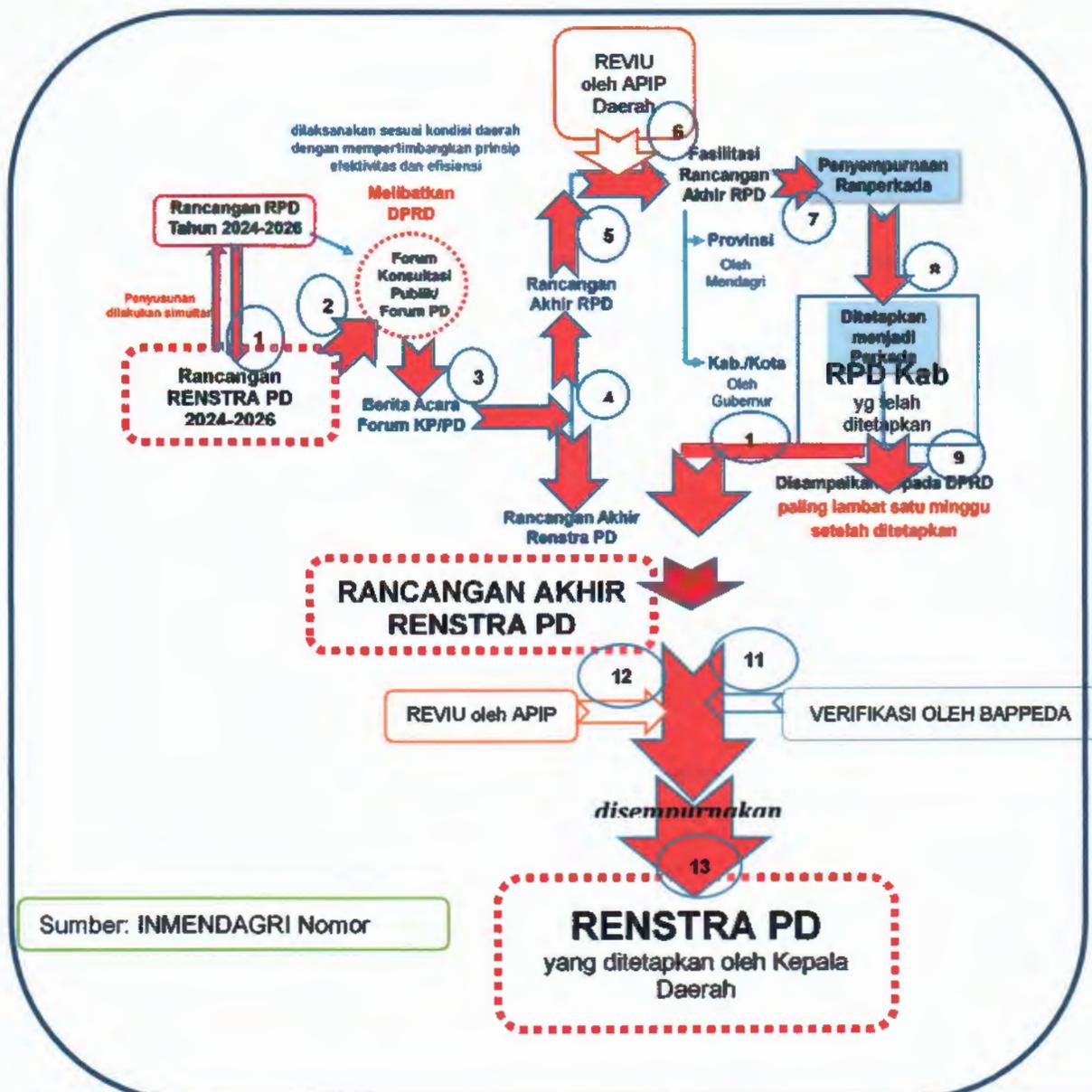
RENSTRA

1.4.1. Kedudukan Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 11 Ayat (2) dan (3), maka Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); b). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan c). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Dokumen Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: a). Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah; dan b). Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, kedudukan dan keterkaitan Dokumen RENSTRA PD terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk posisinya pada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten), dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.1. dibawah ini

Pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah maupun dengan Dokumen Perencanaan Umum Lainnya berdasarkan Peraturan Perundangan **Konsistensi**. Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di dalam Dokumen APBD, namun tidak ada dalam RKPD (begitu juga sebaliknya).

1.4.3. Tahapan, Tata Cara/Proses Penyusunan RENSTRA PD



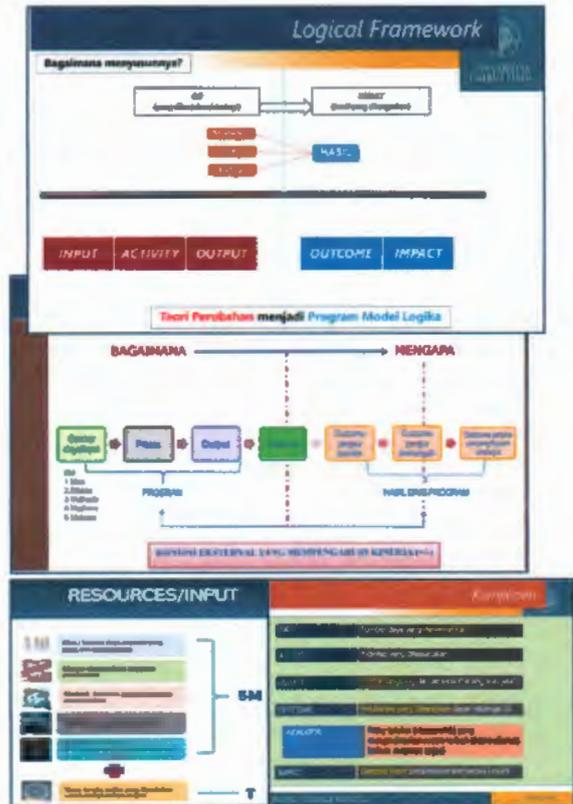
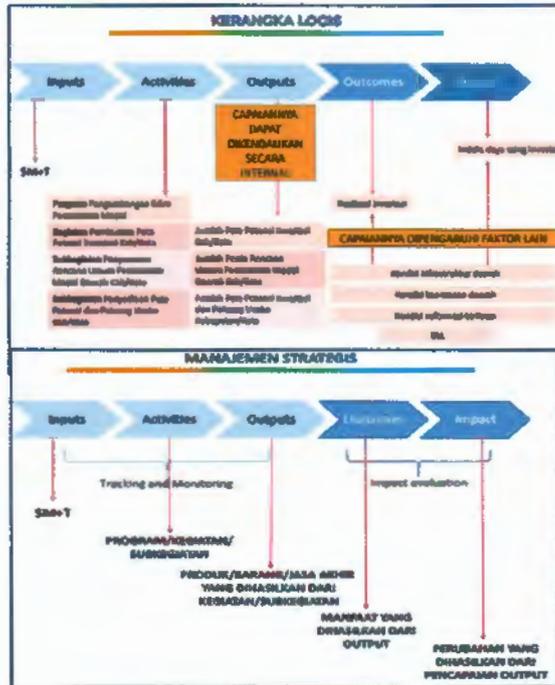
Sumber: INMENDAGRI Nomor

Gambar 3. Tahapan, Tata Cara/Proses Penyusunan RENSTRA PD

1.4.4. Pendekatan Penyusunan RENSTRA PD

1) Pendekatan proses penyusunan, keterkaitan antar substansi dalam subbab/bab.

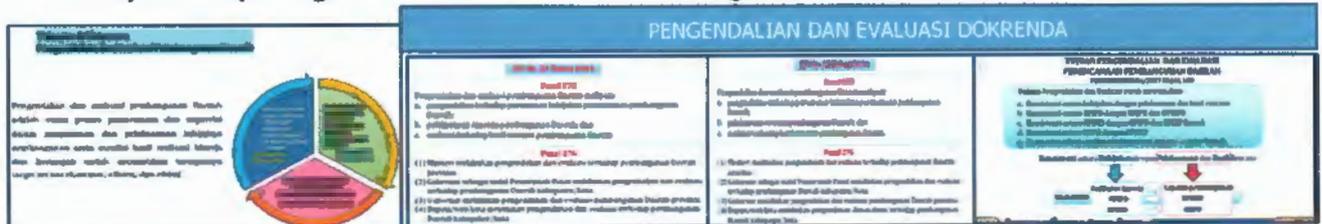
Metode diatas, menjelaskan keterkaitan Bab I-II sebagai SD dan Kinerja Layanan Yang telah dicapai sebelumnya termasuk apakah ada mandat dari Pemerintah yang Harus dicapai Daerah (apakah ada GAP, GAP nya di mana/di pencapaian indikator apa) sebagai **INPUT** yang kemudian **DIPROSES** membentuk aktivitas atau kerja yang tertuang dalam program ke subkeg → menghasilkan **OUTPUTS**. Kumpulan dari aktivitas aktivitas yang saling bersinergi, bersesuaian (dan berkolaborasi) membentuk pencapaian tujuan/sasaran PD (merupakan hasil dan manfaat).



2) Konsep PROSES (Kinerja) RENSTRA PD



3) Konsep Pengendalian Perencanaan Pembangunan



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN,

memuat *Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra.*

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

memuat *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan. Selain itu juga memuat tentang Mitra BAPPELITBANGDA dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA, dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab BAPPELITBANGDA*

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

memuat *Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA berdasarkan capaian kinerja serta isu strategis.*

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

memuat:

1. Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2024 - 2026 yang didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja BAPPELITBANGDA mulai tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

memuat *strategi dan arah kebijakan pembangunan BAPPELITBANGDA tahun 2024-2026 Kabupaten Pasuruan*

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN,

memuat *Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.*

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN,

memuat *penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPELITBANGDA.*

BAB VIII PENUTUP,

memuat *pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.*

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana disampaikan pada Bab 1 Pendahuluan sebelumnya, Bab II ini berisi tentang gambaran pelayanan BAPPELITBANGDA berdasarkan Peraturan perundangan, termasuk evaluasi terhadap pelayanan yang sebelumnya telah dilakukan. Memuat Sub Bab tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA, Sumber Daya BAPPELITBANGDA, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,; dan Kelompok Sasaran Layanan. Selain itu juga memuat tentang Mitra BAPPELITBANGDA dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA, dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab BAPPELITBANGDA.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA, Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, disebutkan bahwa **BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan** Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas "**Sumber Daya Manusia-Perencana**" di Perangkat Daerah, BAPPELITBANGDA memiliki peran sebagai **Instansi Koordinator Jabatan Fungsional Perencana (JFP)** melalui penyelenggaraan fasilitasi pembinaan kompetensi JFP dan pendampingan studi kasus di bidang Perencanaan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, disebutkan bahwa **BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan** Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas "**Sumber Daya Manusia-Perencana**" di Perangkat Daerah, BAPPELITBANGDA memiliki peran sebagai **Instansi Koordinator Jabatan Fungsional Perencana (JFP)** melalui penyelenggaraan fasilitas pembinaan kompetensi JFP dan pendampingan studi kasus di bidang Perencanaan.

TABEL 2.1. DISKRIPSI TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BAPPELITBANGDA KABUPATEN PASURUAN

	ORGANISASI Badan	TUGAS	FUNGSI
	KEPALA BADAN	<i>membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
1.	Sekretariat <ul style="list-style-type: none"> ❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian; ❖ Subbagian Keuangan; dan ❖ JF Kelompok Substansi Perencanaan. 		
2.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan; c. pelaksanaan pengumpulan serta analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; d. pengintegrasian dan harmonisasi program-

	ORGANISASI Badan	TUGAS	FUNGSI
			<p>program pembangunan di daerah;</p> <p>e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;</p> <p>f. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;</p> <p>g. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;</p> <p>h. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;</p> <p>i. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;</p> <p>j. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;</p> <p>k. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindakanjuz penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan</p> <p>p. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan kepala badan.</p>
3.	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	melaksanakan pengkoordinasian perencanaan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.	<p>a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>b. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>e. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;</p> <p>f. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Perekonomian, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;</p>

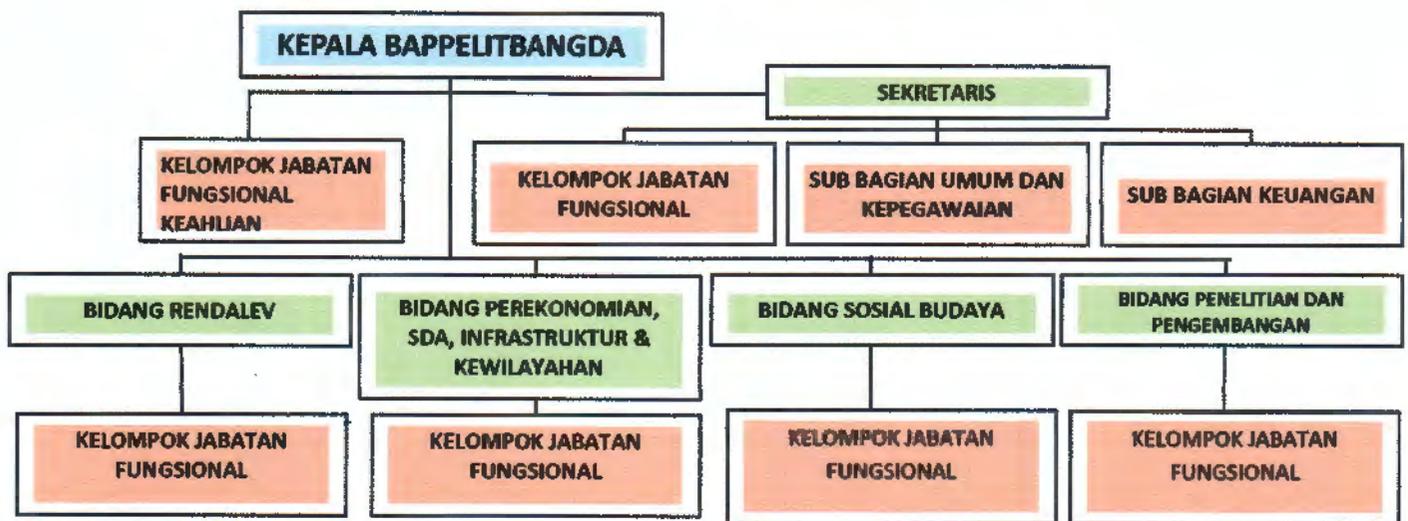
	ORGANISASI Badan	TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> g. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; h. pelaksanaan pengoordinasian dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; i. pelaksanaan pengoordinasian kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; j. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; k. pelaksanaan perencanaan umum, lintas sektor dan lintas Perangkat daerah pendukung rencana pembangunan daerah koordinasi di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; l. pelaksanaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,	melaksanakan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; b. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dokumen Rencana Pembangunan, di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; e. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; f. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia; g. pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; h. pelaksanaan pengoordinasian dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; i. pelaksanaan pengoordinasian kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; j. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

	ORGANISASI Badan	TUGAS	FUNGSI
			Manusia; k. pelaksanaan perencanaan umum, lintas sektor dan lintas Perangkat daerah pendukung rencana pembangunan daerah koordinasi di Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia; l. pelaksanaan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
5.	Bidang Penelitian dan Pengembangan,	melaksanakan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;	a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah; e. pemfasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; f. pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah; g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan; h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
6.	Kelompok Jabatan Fungsional		

Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021; diolah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

2.2 Tugas dan Fungsi

BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Mempunyai. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- g. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- j. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- k. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan

pengembangan; dan

/ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan *fungsinya*.

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - ❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - ❖ Subbagian Keuangan; dan
 - ❖ JF Kelompok Substansi Perencanaan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
 - ❖ Kelompok Substansi Analisis Data ;
 - ❖ Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan;
 - ❖ Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - ❖ Kelompok Pemerintahan
 - ❖ Kelompok Pembangunan Manusia
- e. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan
 - ❖ Kelompok Sustansi Perekonomian
 - ❖ Kelompok Substansi Sumber Daya Alam
 - ❖ Kelompok Substansi Infrastruktur & Kewilayahan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - ❖ Kelompok Substansi Peneliti Sosial Pemerintahan
 - ❖ Kelompok Substansi Ekonomi dan Pembangunan
 - ❖ Kelompok Substansi Perakayasa Inovasi dan Teknologi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten

Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

a. Indeks Profesionalitas ASN di Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya, Nilai IP ASN Bappelitbangda pada Tahun 2022 adalah pada rentang angka 61-70 dengan keterangan masih kategori rendah, dengan nilai tersebut BAPPELITBANGDA masih harus terus untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

b. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Jumlah pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebanyak 56 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 37 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 17 orang. Jumlah pegawai BAPPELITBANGDA ASN berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pendidikan S3 sejumlah 1 orang (2,7%), S2 sejumlah 9 orang (24,3%), S1 sejumlah 19 orang (51,4%), D3 sejumlah 2 orang (5,4%) dan lulusan SMA sebanyak 6 orang (16,2%). Untuk pegawai Non ASN lulusan S1 sejumlah 12 orang (63,1%) dan lulusan SMA sejumlah 7 orang (36,8%), dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Bappelitbangda Kab. Pasuruan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	% terhadap ASN
1	S3	1	2,7

2	S2	7	18,9
3	S1	21	56,7
4	D3	1	2,7
5	SMA	7	18,9
Jumlah		37	100

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

Tabel 2.2
Jumlah Non ASN Bappelitbangda Kab. Pasuruan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	% terhadap Non ASN
1	S1	12	63,1
4	SMA	7	36,8
Jumlah		19	100

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

c. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan jabatan struktural/ fungsional dari 37 pegawai ASN yang ada di Bappelitbangda, terdapat 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 2 orang Eselon IV dan JFT sebanyak 16 orang dan Pelaksana sebanyak 13 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Bappelitbangda Kab. Pasuruan
Berdasarkan Jabatan Struktural/ Fungsional

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	% terhadap ASN
1	Eselon II	1	2,7
2	Eselon III	5	13,5
3	Eselon IV	2	5,4
4	Jabatan Fungsional Tertentu	16	43,2
5	Jabatan Fungsional Umum	13	35,1
Jumlah		37	100

Sumber: Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Kab. Pasuruan Tahun 2022

2.2.2. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Kantor BAPPELITBANGDA terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci KM 9 Bangil-Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang Tupoksi sebagaimana tabel -tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi buruk
1	Kendaraan Dinas (mobil)	10 unit	10 unit	-
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	10 unit	10 unit	-
3	Komputer	48 unit	48 unit	-
4	Laptop	36 unit	36 unit	-
5	Netbook	5	5	-
6	Printer	61 unit	61 unit	-
7	Ploter	1	1	-
8	Scanner	1 unit	1 unit	-
9	UPS	26	26	-
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit	3 unit	-
11	Meja Rapat	22 buah	22 buah	-
12	Kursi Rapat	158 buah	158 buah	-
13	Kursi Tamu	4 buah	4 buah	-
14	Meja Tamu	1 unit	1 unit	-
15	Kursi Putar	2 buah	2 buah	-
16	Meja Biro	5 buah	5 buah	-
17	Meja Komputer	12 buah	12 buah	-
18	Sofa	4 unit	4 unit	-
19	Kursi Kerja	75 unit	75 unit	-
20	Meja Kerja	53 buah	53 buah	-
21	Brankas	3 buah	3 buah	-
22	Kamera	10 unit	10 unit	-
23	LCD Proyektor	9 unit	9 unit	7 unit
24	Layar Proyektor	2 unit	2 unit	-
25	Microphone	1 unit	1 unit	-
26	Telepon	30 unit	30 unit	-
27	Mesin Faksimile	4 unit	4 unit	-
28	Televisi	1 buah	1 buah	-
29	Air fryer	7 buah	7 buah	-
30	Sound sistem	1 paket	1 paket	-
31	Wireless	1 buah	1 buah	-
32	Handycam	5 buah	5 buah	-
33	GPS	5 unit	5 unit	-
34	Air Conditioner	36 unit	36 unit	-
35	Mesin Fotokopi	1 unit	1 unit	-
36	Lemari Besi	13 buah	13 buah	-
37	Rak Kayu	16 buah	16 buah	-
38	Filling Besi/Metal	16 buah	16 buah	-
39	Lemari Kaca	2 buah	2 buah	-
40	Lemari Kayu	14 buah	14 buah	-

No	Uraian	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi buruk
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah	5 buah	-
42	Lemari Peta	1 buah	1 buah	-
43	Papan Visuil	1 buah	1 buah	-
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah	3 buah	-
45	Papan Pengumuman	14 buah	14 buah	-
46	Mesin Absensi	1 buah	1 buah	-
47	Papan Panel	1 buah	1 buah	-

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2022

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Gedung BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi baik (ruang)	Kondisi buruk
1	Ruang Kaban	1	Ruang	1	-
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang	1	-
3	Ruang Sekretariat	2	Ruang	2	-
4	Ruang Bidang	4	Ruang	4	-
5	Ruang Rapat	3	Ruang	3	--
6	Ruang Gudang	2	Ruang	2	-
7	Lobby	1	Ruang	1	-
8	Musholla	1	Ruang	1	-
9	Dapur	1	Ruang	1	-
10	Toilet / Kamar Mandi	5	Ruang	5	-

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualitas birokrasi pemerintah. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kerjanya,

berdasarkan sasaran target renstra periode 2019-2022 yaitu :

- Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik pada target yang telah ditentukan pada realiasi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2021 tidak mengalami kenaikan namun hanya terjadi pada perubahan jumlah Perangkat Daerah pada tahun 2021 sebanyak 56 Perangkat daerah, sedangkan tahun 2022 sejumlah 55 perangkat daerah dengan jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan kurang baik sebanyak 3 perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Kecamatan Pasrepan dan Dinas Komunikasi dan Informatikan.
- Indikator Persentase dokumen perencanaan sesuai ketentuan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 100%.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi produk Bappelitbangda selama tahun 2019-2022 antara lain :

2019		2020		2021		2022	
RKPD 2020		RKPD 2021		RKPD 2022		RKPD 2023	
Perubahan 2019	RKPD	Perubahan 2020	RKPD	Perubahan RKP 2021	Perubahan 2022	RKPD	
				Perubahan RPJMD 2018-2023			

Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun rutin setiap tahunnya yaitu RKPD dan Perubahan RKPD, pada tahun 2021 disusun Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

- Indikator Persentase Litbang yang dimanfaatkan capaian tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 100%;

Dokumen kajian hasil penelitian dan pengembangan tahun 2019-2022 di jelaskan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Dokumen Kajian Hasil Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2019-2022

2019	2020	2021	2022
Pemberdayaan berbasis keluarga berdasarkan penelitian	Indeks Williamson	Kajian Pengembangan Brand Kopi Kapiten dalam pembangunan	Kajian pencapaian visi menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat,

2019	2020	2021	2022
penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kab Pasuruan		Kab Pasuruan	Sejahtera dan Berdaya Saing
Pengembangan bibit durian unggul berdasarkan penelitian Pengembangan Pasar Daerah Berbasis Komoditi Lokal	Indeks Kesalehan Sosial	Evaluasi program satria emas di Kab Pasuruan	Kajian Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		Indeks Kesenjangan Wilayah Kab Pasuruan	Kajian Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
		Kajian Strategis pengelolaan BUMD Kab. Pasuruan menuju tatakelola perusahaan yang baik	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Dampak Penegmbangan Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS)
		Kajian pemulihan ekonomi dampak covid-19 melalui badan usaha milik desa (Bumdes)	Kajian Lahan Pertanian untuk Pengembangan Budidaya Tembakau di Kabupaten Pasuruan
		Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren di Kabupaten Pasuruan
		Pengembangan Investasi wilayah timur Kab Pasuruan	Kajian Pengeluaran (Spending of Money) Wisatawan di Kab Pasuruan
		Evaluasi pembangunan berbasis keluarga melalui desentralisasi kebijakan sosial di Kab. Pasuruan	Kajian Penyusunan Indeks Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
		Kajian Dampak Limbah Busmatik	Kajian Pengembangan Bibit Unggul Durian Lokal Kec. Purwosari

- Indikator nilai sakin perangkat daerah mulai tahun 2019 sampai 2022 terus naik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Tahun 2019-2022. Anggaran yang terealisasi dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.7

TABEL 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik				84	88	91	94,5	100	85	89	94,64	94,5	-	101	101	104	100	-
	<i>Jumlah PD yg memiliki dok perencanaan yg baik</i>				47	49	51	52	-	48	50	53	52	-					
	<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>				56	56	56	55	55	56	56	56	55	55					
2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan				-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan				80	85	100	100	100	80	100	100	100	-	80	100	100	100	-
	<i>Jumlah Penelitian yg dimanfaatkan</i>				8	15	24	33	41	8	15	24	33	41					

	Jumlah Akumulasi Penelitian dan Pengembangan mulai Tahun 2018				10	15	24	33	41	10	15	24	33	-					
4	Nilai SAKIP OPD				75	81	83	84	85	76,43	81,48	83,42	84,78	-	98,1	100.9	100.5	100,8	-

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program & Kegiatan Perangkat Daerah
BAPPELITBANGDA Tahun 2019-2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan administrasi kantor	845.038					815.386,88											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon dan internet	51.950					47.877,35						0,92					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor panitia kegiatan dan pengelola keuangan	108.985					95.880,00						0,88					
	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Honorarium jasa kebersihan kantor	22.310					22.310,00						1,00					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	19.420					19.420,30						1,00					
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan	43.442					42.810,00						0,99					
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan koran	9.236					7.400,00						0,80					
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	72.400					72.357,00						1,00					
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	369.365					363.814,23						0,98					
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Honor Tenaga kontrak	147.950					143.500,00						0,97					
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aperatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	402.635					379.912,95						379.912,95					165,99

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	426.048					410.178,7 3					410.178,7 3						103,87
	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kewirausahaan penanaman modal dan ketenagakerjaan	Jumlah rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan penanaman modal	121.232					115.279,5 4					115.279,5 4						105,16
	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten pasuruan tahun 2018-2038	Dokumen rencana pembangunan industri kabupaten pasuruan	279.040					273.818,5 0					273.818,5 0						101,91
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase OPD lingkup bidang sosbud dengan capaian program minimal 80% dari target indikator RPJMD	823.384					769.531,5 8					769.531,5 8						107,09
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Laporan hasil koordinasi	322.061					301.236,7 0					301.236,7 0						106,91
	Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	Laporan hasil koordinasi	107.007					99.143,20					99.143,20						107,93
	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Dokumen hasil kajian	30.384					27.954,85					27.954,85						108,69
	Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Laporan hasil koordinasi	137.991					134.829,6 3					134.829,6 3						102,34
	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan	Dokumen hasil kajian	225.942					206.367,2 0					206.367,2 0						109,49

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Den Sumber Daya Alam	Persen OPD lingkup bid praswil dan SDA dgn capaian prog minimal 80% dari target IRP.JMD	794.250					653.638,8 0					653.638,8 0						121,51
	Koordinasi penenganan perumahan dan permukiman di kabupaten pasuruan	Jumlah koordinasi penenganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten pasuruan	197.500					178.244,5 0					178.244,5 0						110,80
	Koordinasi Peny. Kebijakan Pengembangan Praswil Di Kab. Pas.	Jumlah koordinasi perencanaan pengembangan prasarana wilayah di kabupaten pasuruan	179.500					175.354,8 0					175.354,8 0						102,36
	Penyusunan deta base perencanaan prasarana wilayah	Jumlah dokumen penyusunan deta base prasarana wilayah di kabupaten pasuruan	417.250					300.039,5 0					300.039,5 0						139,07
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan menjadi kebijakan daerah	1.545.549					1.509.696, 52					1.509.696, 52						102,37
	Fasilitasi dewan riset daerah (DRD) kabupaten pasuruan	Jumlah laporan hasil FGD	620.249					584.646,2 2					584.646,2 2						106,09
	Penelitian dan pengembangan sosial ekonomi	Hasil penelitian	625.300					625.239,4 0					625.239,4 0						100,01
	Penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah dokumen litbang inovasi teknologi	300.000					299.810,9 0					299.810,9 0						100,06

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kesuaian proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai kewenangan	390.000					325.095,05						325.095,05						119,96
	Penataan ruang daerah kabupaten pasuruan	Persentase penyelenggaraan pembinaan penataan ruang daerah kabupaten pasuruan	390.000					325.095,05						325.095,05						119,96
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik							1.455.886.510,00						1.455.886.510,00					100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon dan internet							115.008.447,00						115.008.447,00					100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan							344.678.000,00						344.678.000,00					100,00
	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih							18.950.375,00						18.950.375,00					100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis alat kantor							102.350.000,00						102.350.000,00					100,00
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan							64.459.600,00						64.459.600,00					100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan							14.000.000,00						14.000.000,00					100,00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat							157.400.000,00						157.400.000,00					100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah							442.190.088,00						442.190.088,00					100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	Penyediaan Jasa Perkantoran	jumlah tenaga kontrak dan THL yg terbayar						146.850.000,00						146.850.000,00						100,00
	Pengelolaan dan Managemen Arsip	jumlah panjang arsip yg dikelola						50.000.000,00						50.000.000,00						100,00
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik						629.109.500,00						629.109.500,00						100,00
	Pengadaan Peralatan Kantor	jenis alat kantor						60.750.000,00						60.750.000,00						100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara						372.650.000,00						372.650.000,00						100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	jumlah alat kantor yg terpelihara						91.700.000,00						91.700.000,00						100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan yg terbayar PKB dan asuransi						104.009.500,00						104.009.500,00						100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase aparatur yang memiliki diklat						351.630.000,00						351.630.000,00						100,00
	Bimtek Perencanaan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan						351.630.000,00						351.630.000,00						100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	IKM Internal Bappeda						200.980.000,00						200.980.000,00						100,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan tahunan						200.980.000,00						200.980.000,00						100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan							2.363.371.349,00						2.363.371.349,00						100,00
	Penetapan RPJMD	jumlah Perda RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan							258.318.371,00						258.318.371,00						100,00
	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD tahun n dan perubahan RKPD tahun n-1							138.372.844,00						138.372.844,00						100,00
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD							670.000.000,00						670.000.000,00						100,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaporan							103.083.346,00						103.083.346,00						100,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan							127.104.500,00						127.104.500,00						100,00
	Penyusunan KUA-PPAS beserta dan KUA-P dan PPAS-P	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP							98.238.500,00						98.238.500,00						100,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pendataan							98.253.788,00						98.253.788,00						100,00
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen hasil pelaporan							415.000.000,00						415.000.000,00						100,00
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek perencanaan							455.000.000,00						455.000.000,00						100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik						889.030.116,00						889.030.116,00						100,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian						96.588.971,00						96.588.971,00						100,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro						201.322.745,00						201.322.745,00						100,00
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Wonorejo, Kejayan, Pohjentrak dan Kraton Kabupaten Pasuruan	Dokumen Perencanaan						241.834.000,00						241.834.000,00						100,00
	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataan penanaman modal dan ketenagakerjaan	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataan penanaman modal dan ketenagakerjaan						114.940.900,00						114.940.900,00						100,00
	Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kabupaten Pasuruan	Dokumen Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kab. Pasuruan						234.343.500,00						234.343.500,00						100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik						908.454.32 1,00						908.454 .321,00						100,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	laporan hasil koordinasi						280.802.28 1,00						280.802 .281,00						100,00
	Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	laporan hasil koordinasi						126.458.19 0,00						126.458 .190,00						100,00
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen perencanaan						132.420.50 0,00						132.420 .500,00						100,00
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	laporan hasil koordinasi						198.885.60 0,00						198.885 .800,00						100,00
	Monitoring Evaluasi dan Pengedalan Bidang Sosial Budaya	laporan hasil koordinasi						58.447.750 .00						58.447. 750,00						100,00
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur	dokumen perencanaan						111.440.00 0,00						111.440 .000,00						100,00
	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase OPD lingkup bidang praswil dan SDA dengan capaian program minimal 80% dari target indikator RPJMD						917.724.95 0,00						917.724 .950,00						100,00
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil koordinasi	250.000.0 00,00					188.017.00 0,00						188.017 .000,00						100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	Koordinasi Peny. Kebijakan Pengembangan Praswil di Kab. Pas.	Jumlah laporan hasil koordinasi	347.000.000,00					289.707.950,00						289.707.950,00						100,00
	Penyusunan Data Base Perencanaan Praserana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	440.000.000,00					440.000.000,00						440.000.000,00						100,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam kebijakan daerah	2.445.000.000,00					2.190.748.467,00						2.190.748.467,00						100,00
	Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil kelibangan	914.525.000,00					892.320.764,00						892.320.764,00						100,00
	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil kelibangan	730.475.000,00					714.939.914,00						714.939.914,00						100,00
	Facilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan	Jumlah laporan hasil FGD	800.000.000,00					583.487.789,00						583.487.789,00						100,00
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kesuaian proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentasan	1.000.000.000,00					853.306.100,00						853.306.100,00						100,00
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah laporan hasil koordinasi	400.000.000,00					307.353.850,00						307.353.850,00						100,00
	Penyusunan SIG Peta Tematik dan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	608.000.000,00					545.952.250,00						545.952.250,00						100,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rate-Rate Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran		1.830.832.226,00					1.588.459.420						1.588.459.420,00					115,25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan		116.700.000,00					66.471.391						66.471.391,00					170,44
	Penyediaan Jasa Jaminan Berang Milik Daerah	Jumlah Baang yang diasuransikan		27.000.000,00					23.999.052						23.999.052,00					112,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dines/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pejeknya		16.750.000,00					7.755.100						7.755.100,00					215,99
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa		231.950.000,00					132.845.000						132.845.000,00					174,60
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian ATK		41.175.000,00					39.930.000						39.930.000,00					103,12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian barang cetakan dan penggandaan		104.718.100,00					99.660.000						99.660.000,00					105,08
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		27.226.750,00					25.811.500						25.811.500,00					105,48
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		11.380.000,00					9.850.000						9.850.000,00					115,53
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat		107.840.000,00					106.430.000						106.430.000,00					101,32
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah		415.080.426,00					414.413.327						414.413.327,00					100,16

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro		170.811.050,00						126.176.500								126.176.500,00				135,37
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	Dokumen perencanaan pembangunan bidang pariwisata, penanaman modal dan ketenagakerjaan		256.102.000,00						245.182.000								245.182.000,00				104,45
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Pertanian		4.210.000,00						4.210.000								4.210.000,00				100,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepariwisata, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen perencanaan pada sektor lingkup sub bid kepariwisataan, penanaman modal dan ketenagakerjaan yang sesuai ketentuan		304.067.150,00						277.590.014								277.590.014,00				109,54
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik		647.235.364,00						529.171.215								529.171.215,00				122,31
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Laporan Hasil Koordinasi		130.910.400,00						67.608.280								67.608.280,00				193,63
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		127.159.025,00						116.388.579								116.388.579,00				109,25

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan dan kepemudaan		99.113.05 0,00					78.660. 018						78.660. 018,00					126,00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan apratur		168.855.6 77,00					157.404. 926						157.404. 926,00					107,15
	Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	Jumlah laporan hasil fasilitasi forum kabupaten sehat		121.397.2 12,00					109.109. 412						109.109. 412,00					111,26
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi		1.976.674. 230,00					1.425.9 00.909						1.425.9 00.909, 00					138,63
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen hasil pelaporan		376.755.0 00,00					5.845.5 91						5.845.5 91,00					6445,11
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	Jumlah dokumen hasil pelaporan		112.811.0 00,00					111.409. 024						111.409. 024,00					101,26
	Penyusunan RPJMD	Draft Review RPJMD		445.750.3 00,00					353.333. 000						353.333. 000,00					126,16
	Fasilitasi Kenduremas	Jumlah laporan hasil fasilitasi Kenduremas		114.568.9 00,00					70.294. 890						70.294. 890,00					162,96
	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD		498.545.1 00,00					492.954. 360						492.954. 360,00					101,13

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen musrenbang RKPD		287.482.080,00					284.519.744						284.519.744,00				106,68
	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pendataan		39.925.000,00					35.737.500						35.737.500,00				111,72
	Penyusunan KUA_PPAS beserta dan KUA_P PPAS_P	Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUPA dan PPAS-P		100.836.850,00					91.806.800						91.806.800,00				109,84
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan litbang		1.330.965.360,00					1.329.879.229						1.329.879.229,00				100,08
	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil kelibangan		449.792.460,00					448.956.229						448.956.229,00				100,19
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil kelibangan		355.449.800,00					355.343.200						355.343.200,00				100,03
	Penelitian dan Pengembangan, Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil kelibangan		40.972.600,00					40.967.300						40.967.300,00				100,01
	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah laporan hasil FGD		484.750.500,00					484.612.500						484.612.500,00				100,03
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik		1.237.579.850,00					1.225.689.887						1.225.689.887,00				100,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun subbidang perumahan dan permukiman		236.884.300,00					236.362.050						236.362.050,00				100,22

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perakonomian & SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik																	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik			793.126.400	724.407.600	763.706.000			367.811.411	668.659.467								118,61
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik			70.832.300	168.286.900	101.220.900			63.607.230	152.210.305								46,54
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi perencanaan bidang pemerintahan			-	42.495.100	51.363.700			-	39.540.700				0				0,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan			-	19.661.600	-			-	9.556.500				0				0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pd Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			803.003.000	819.497.100	490.000.000			797.957.300	818.834.800				797.957.300,00			100,63	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terkaksananya kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi			335.378.800	370.303.100	728.200.000			182.315.300	367.463.327				182.315.300,00			183,96	
	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi			186.435.800	370.303.100	436.200.000			182.315.300	367.463.327								
	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bid Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan					292.000.000			182.315.300	367.463.327				182.315.300,00			0,00	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu tiga tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPD. Hal ini juga disinkronkan antara peluang dan tantangan yang ada di tingkat nasional dan Propinsi Jawa Timur. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA

Tantangan merupakan situasi bagi organisasi yang datang dari luar organisasi. Tantangan Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Masih adanya Perangkat Daerah yang masih belum mempunyai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang baik
- b. Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan tetapi, belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan menyebabkan hasil-hasil pembangunan juga belum dapat dirasakan secara maksimal.
- c. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan. Menghilangkan ego-sektoral antar bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan sesuai tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA.

- d. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini, pada intinya adalah merupakan proses koordinasi, pengendalian dan penyeimbang setiap hubungan interaksi tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Penguatan aspek manajerial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkatan pelaksana.
- e. Belum terintegrasinya pengelolaan system perencanaan, penganggaran evaluasi dan pelaporan
- f. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, hal ini disebabkan proses politis mempengaruhi dinamika perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA

Peluang adalah situasi atau kondisi yang memberikan peluang dari luar organisasi yang berkembang dimasa mendatang. Peluang dalam pengembangan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Meningkatnya peran serta stakeholder (masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan dengan ikut serta memberikan saran, masukan dan usulan-usulan rencana pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dengan Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Kabupaten Pasuruan terus melakukan peningkatan kapasitas, baik

itu kapasitas kelembagaan maupun kapasitas aparatur melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan formal, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada.

- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan mendorong peningkatan kinerja, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah proses dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.
- d. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
- e. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan seperti aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD). BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan akan terus mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan.
- f. Adanya Kajian terkait Penyelesaian Masalah dan Pengembangan Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Kabupaten Pasuruan
- g. Dalam meningkatkan SDM perencana, BAPPELITBANGDA meningkatkan pelayanan kepada Perangkat Daerah dengan membuka layanan klinik perencanaan, serta dengan mengadakan Bimtek Perencanaan.
- h. Mengintegrasikan antara hasil penelitian dan pengembangan yang disusun untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan dasar untuk menetapkan kebijakan-kebijakan daerah

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan. Maka fungsi dari Bappelitbangda adalah sebagai leading sector dan menjalankan fungsi koordinasi sectoral.

Sasaran layanan Bappelitbangda adalah semua perangkat daerah Kecamatan, yang terdiri dari 31 perangkat daerah dan 24 kecamatan, selain itu DPRD juga termasuk dalam sasaran layanan, dimana kedudukan Bappelitbangda adalah sebagai mitra. Lingkup Layanan berdasarkan PD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.8

Tabel 2.8
Sasaran Layanan dan Stakeholders Bappelibangda

BIDANG-BIDANG DI BAPPELIT-BANGDA	LAYANAN	SASARAN LAYANAN	Stakeholders lain/Mitra
BIDANG RENDALEV (Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi)	Koordinator pelayanan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah :	Seluruh PD di Kabupaten Pasuruan (sungram)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dan PD Pusat/Balai, dsbnya; - Instansi vertical (BPN, BPS, dll) - Pemerintah Daerah Provinsi dan PD Provinsi ; - CSR Perusahaan Yang Berusaha d Kabupaten Pasuruan; - Perbankan ; - BUMD yg mendukung kinerja PD, missal PDAM - DPRD;AL, dsbnya - POLRES/KODIM/KORAMIL/AU - Lembaga/Instansi Lainnya di Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dg PD dan/atau Pemda Kab. Pasuruan berkaitan dalam rangka mendukung pencapaian Kinerja PD/Pemda Kab. Pasuruan
	Koordinator Tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah :		
	a) persiapan penyusunan;		
	b) penyusunan rancangan awal;		
	c) penyusunan rancangan;		
	d) pelaksanaan Musrenbang/Konsultasi Publik/Forum PD-Lintas PD;		
e) perumusan rancangan akhir; dan			
f) penetapan.			
Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Koordinator Operasional SIPD			
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi dg PD dan Stakeholders & Mitra Lingkup Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dalam rangka penyusunan Dokumen Perenc. Pemb Daerah	- Seluruh PD di Kabupaten Pasuruan (sungram dan Kabid/JF Perencanaan Teknis Sektoral	(terkait lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dan PD Pusat/Balai, dsbnya; - Instansi vertikal - Pemerintah Daerah Provinsi dan PD Provinsi ;

BIDANG-BIDANG DI BAPPELITBANGDA	LAYANAN	SASARAN LAYANAN	Stakeholders lain/Mitra
		sesuai lingkup PD nya)	<ul style="list-style-type: none"> - CSR Perusahaan Yang Berusaha d Kabupaten Pasuruan; - Perbankan ; - BUMD yg mendukung kinerja PD, missal PDAM - DPRD;AL, dsbnya - POLRES/KODIM/KORAMIL/AU - Lembaga/Instansi Lainnya di Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dg PD dan/atau Pemda Kab. Pasuruan berkaitan dalam rangka mendukung pencapaian Kinerja PD/Pemda Kab. Pasuruan; - Akademisi/PT - Lembaga swasta lain yang bekerjasama dengan Pemda Kab. Pasuruan dlm berbagai bidang dan mempunyai keterkaitan dengan upaya pencapaian kinerja pembangunan/pemerintahan di kab. pasuruan
	Asisten Dok. RENSTRA/RENJA PD Lingkup Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dalam rangka penyusunan Dokumen Perenc. Pemb Daerah		
	Monev. Dok. RENSTRA/RENJA PD Lingkup Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dalam rangka penyusunan Dokumen Perenc. Pemb Daerah		
	Penyusunan Sinkronisasi (Sinergitas –Harminisasi) nya Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi dg PD dan Stakeholders & Mitra Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur & Kewilayahan (LH, Kebencanaan & TARU) dalam rangka penyusunan Dokumen Perenc. Pemb Daerah	- Seluruh PD di Kabupaten Pasuruan (sungram dan Kabid/JF Perencanaan Teknis Sektoral sesuai lingkup PD nya)	
	Asisten Dok. RENSTRA/RENJA PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur & Kewilayahan (LH, Kebencanaan & TARU) dalam rangka penyusunan Dokumen Perenc. Pemb Daerah		
	Monev. Dok. RENSTRA/RENJA PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur & Kewilayahan (LH, Kebencanaan & TARU) dalam rangka penyusunan Dokumen Perenc. Pemb Daerah		



BIDANG- BIDANG DI BAPPELIT- BANGDA	LAYANAN	SASARAN LAYANAN	Stakeholders lain/Mitra
	Penyusunan Sinkronisasi (Sinergitas –Harminisasi) nya Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur & Kewilayahan (LH, Kebencanaan & TARU) dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEM- BANGAN	Penyusunan dan Fasilitasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>		
	Penyusunan dan Fasilitasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan <i>Bidang Sosial dan Kependudukan</i>		
	Penyusunan dan Fasilitasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan <i>Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>		
	<i>Penyusunan dan Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, BAPPELITBANGDA bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan kedepan mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu perencanaan dan kelitbangan yang mengandung tiga permasalahan inti seperti berikut ini :

- a) Secara umum semuanya disimpulkan "hampir sesuai dengan target" dan "sesuai target". Hampir sesuai karena range GAP nya hanya sekitar rasio 0,01.
- b) Masih ada kesenjangan/GAP dalam pelayanan, khususnya pada nilai "hamper sesuai", yaitu pada Indikator Layanan Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik, dan Indikator Nilai SAKIP OPD;
- c) Pelayanan mana saja target telah tercapai, terdiri dari Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan sesuai Ketentuan, Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang di manfaatkan;
- d) faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini. Indikator Layanan yang sesuai target adalah Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan dan Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan adalah mengingat 2 indikator ini tidak bergantung pada keberhasilan pihak lain (berbeda dengan 2 indikator lainnya yang hamper memenuhi target).
- e) Pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Salah satu yang sangat mempengaruhi

ketidaktercapaiannya Indikator layanan Prosentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik, serta Indikator Nilai SAKIP PD antara lain adalah:

- Indikator ini, sangat sangat dipengaruhi oleh keberhasilan kuantitas dan kualitas dari Dokumen Perencanaan Pembangunan PD yang disusun, divalidasi serta ditetapkan menjadi Aturan/Pedoman;
- masih kurangnya komitmen Pimpinan PD untuk memiliki dokumen perencanaan pembangunan PD yang baik. Menurut analisa sementara BAPPELITBANGDA, mengingat dokumen perencanaan pembangunan di PD atau Dokumen Perencanaan Strategis PD itu kurang mendapatkan atensi dari pimpinannya, sehingga yang menyusun Dokumen RENSTRA RENJA maupun beberapa bahan perumusan untuk Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD/RPJMD-RPD/RKPD) adalah didominasi hanya Sungram atau JF Perencanaan di Sekretariat saja. Oleh karena itu, ;
- Penekanan terhadap PD untuk menjadikan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD nya sebagai satu satunya dasar untuk penyusunan perencanaan strategis yang lebih detail (RENJA) dan perencanaan teknis sektoral layanan di PD tersebut sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017, belum mampu memberikan hasil yang maksimal kepada PD.

Oleh karenanya pembinaan, pembekalan dan pendampingan kepada PD agar menghasilkan output dokumen yang berkualitas baik sangat diharapkan. Disamping harus dibuat Aturan tambahan yang dapat memberikan supporting dan mendukung BAPPELITBANGDA menjadi fasilitator, verifikator-validator, serta enabler untuk mendukung hal/kondisi tersebut.

3.2 Permasalahan Aktual

Permasalahan Aktual atau Permasalahan yang menjadi topik bahasan skala besar/regional/global saat ini tetapi sangat berpengaruh terhadap kinerja layanan BAPPELITBANGDA di masa datang. Permasalahan ini diambil dari Bab 2.5 sebelumnya Kondisi Tuntutan, Tantangan dan Peluang yang berpengaruh pada kinerja layanan.

A. Perubahan Kebijakan Nasional dan Krisis Global/Dunia Akibat Pandemi

Covid-19 belum sepenuhnya pulih dan secara tidak langsung mempengaruhi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, antara lain :

- 1) Penanganan Pandemic covid-19 masih belum selesai, masih ada varian baru varian baru yang terus berkembang dan harus diwaspadai agar tidak terjadi lagi dampak negative dari pandemic terhadap kehidupan social dan ekonomi seperti sebelumnya ;
- 2) Adanya isu global/dunia : krisis pangan, krisis energy, penurunan investasi dan inflasi, dan kerusakan lingkungan
- 3) Issue Nasional: penurunan nilai dan pertumbuhan investasi serta tingkat daya beli masyarakat yang belum stabil semenjak Pandemi Covid-19;
- 4) Issue Lokal : pemerataan, kemiskinan, kondisi kerawanan social yang belum pulih antara lain kemiskinan, stunting, menurunnya tingkat pendidikan masyarakat, penurunan daya belidan GAP,kebencanaan yang akhir-akhir ini sering terjadi karena perubahan cuaca yang ekstrem.
- 5) Peluang/Tantangan yaitu tahun politik baru dengan kebijakan Nasional Pemilukada serentak (Tahun 2024-2025); deficit APBN (keterbatasan peluang pendanaan ; peluang-peluang baru pengembangan industry baru; era Era digitalisasi; Peluang dan Tantangan pemulihan ekonomi yang berdampak luas yaitu “pengembangan Sektor Kepariwisata sebagai Motor Penggerak”, Pengembangan Investasi dan Pengembangan Industri (khususnya yang menggunakan tenaga kerja non keahlian yang cukup besar).
- 6) Perubahan Kebijakan Nasional di Bidang Manajemen kepegawaian yaitu Adanya Jabatan Fungsional dan Sistem Kerja Agile Organization, yang dengan SOTK dan mekanisme serta Manajemen kerja yang lama tidak mampu menggiring kearah perubahan yang diinginkan/seharusnya, serta BAPPELITBANGDA dengan Tugas utama di bidang “perencanaan” maka seharusnya memiliki beban tambahan sebagai fasilitator para JF Perencana yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk berkembang dan menjadi berkompeten dan berdaya saing.
- 7) Penjabaran Kerangka Perencanaan Wilayah dari konsep rencana yang sebelumnya

bersifat Sektoral, dan tdk berbasis kesatuan integrase wilayah. Saat ini dari Kebijakan Nasional dituntut Sektor dan regional melakukan koordinasi menyusun kebijakan, sasaran, target, program, kegiatan, proyek prioritas, dan kebutuhan anggaran berbasis wilayah/lokus tetapi dengan konsep integrase-kolaborasi sehingga diharapkan Perencanaan dan Pelaksanaan dapat lebih optimal dan berwujud.

- 8) Kebijakan Nasional SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), SATU DATA INDONESIA-PORTAL SATU DATA (Data adalah unsur sangat penting terhadap Perencanaan), ONE MAP ONE POLICY (terkait data yang berbasis spasial atau lokasi/wilayah tertentu), Reformasi Birokrasi-Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang BerAkhlak, serta Penguatan SDManusia.

B. Kondisi Internal BAPPELITBANGDA

- 1) Keterbatasan jumlah dan kompetensi/kemampuan baik teknis maupun maupun manajerial ;
- 2) Kesulitan untuk mengkomodir Perubahan Kebijakan di bidang kepegawaian, Sistem Kerja dan Manajemen Pegawai dengan kondisi yang hanya berdasarkan SOTK saja;
- 3) Pelayanan yang dilakukan BAPPELITBANGDA saat ini masih bersifat manual, dan ini tidak selaras dengan tuntutan yang semakin maju, transparan dan akuntable diluar khususnya terkait optimalisasi Aplikasi SIPD sebagai satu satunya aplikasi yang dimiliki Pusat dan terintegrasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka harus dibuat aplikasi-aplikasi yang menunjang kinerja dari SIPD agar dapat lebih optimal, efisien dan efektif penggunaannya di masa dating. Mengingat Konsep Integrasi yang dilakukan adalah Perencanaan – Penganggaran, dan tidak menyentuh ke “proses” menuju kesitu yang menjadi Tugas dan kewenangan BAPPELITBANGDA Kabupaten, diantaranya :
 - proses penyelenggaraan persiapan sebelum penetapan dokumen perencanaan pembangunan dan strategis PD (verifikasi/asistensi dokumen secara digital);

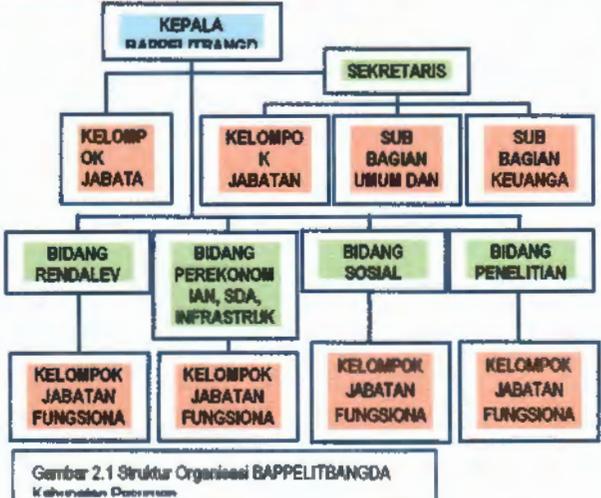
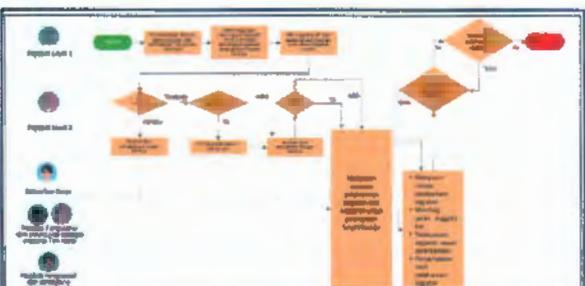
- proses persiapan data, informasi dan syarat pendukung pada Pelaku/pemanfaat program/kegiatan sebelum masuk ke input SIPD;'
 - proses tata kelola organisasi yang harus dapat mendukung membagi dan lebih meningkatkan peran BAPPELITBANGDA;
 - proses sinkroinisasi ;
 - proses pengendalian dan evaluasi secara digital;
- 4) Tidak semuanya tahapan, proses dan output perencanaan dapat terakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang SOTK Bappelitbangda.

Diperlukan suatu manajemen perubahan yang bisa memfasilitasi penguatan SDM dan menyelesaikan menguatkan SDM BAPPELITBANGDA dalam menjalankan tugas dan peran BAPPELITBANGDA sebagai perencana dan penelitian-pengembangan terhadap TUNTUTAN-TANTANGAN-PELUANG yang ada saat ini dan dimasa akan datang.

3.3 Issue Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Issue Strategis	Solusi
<p>1) Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dan Strategis PD (RENSTRA DAN RENJA PD Termasuk Pengendalian Dan Evaluasinya, Belum Tersedia Secara Digital.</p> <p>2) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Perencana Secara Berkala Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Sehingga Mampu Mengadap Tantangan Dan Peluang Yang Terjadi</p>	<p>1. Membuat Draf Aturan Hukum Dulu (Perda/Perbup) Yang Bersifat Mengatur Sebagai Pijakan/Dasar Untuk Menjembatani Proses Dan Output Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Yang Dilakukan Bappelitbangda Kepada Pd Termasuk Proses Digitalisasinya Nanti. (Jangka Pendek); Termasuk Membangun Embrio Proses Penyusunan Perencanaan Dengan Konsep Tematik (Belum/Tdk Menggunakan Konsep Spasial/Permetaan) Dan This (Menggunakan Utuh</p>

Issue Strategis	Solusi
 <p>Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan</p>   	<p>Holistic Tematik, Integrative Dan Spasial/Pemetaan) → Jangka Pendek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan Data pendukung Perencanaan pembangunan, keterkaitannya dengan SATU DATA INDONESIA/PORTAL SATU DATA, SPBE secara digital ; 3. Jangka Panjang: Membuat Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi Secara Digital Yang Terintegrasi Dengan System Sisd Dari Nasional, Sistem Satu Data/Portal Satu Data, Dan Memungkinkan System Perencanaan Sectoral Sebagai Di PD Kabupaten, Maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Lainnya. 4. Membuat Manajemen Perubahan, Teamwork dan optimalisasi hasil dengan target mewujudkan proyek prioritas sebagai strategi dari upaya untuk mencapai Tujuan Organisasi.-- > dengan menggunakan konsep PERENCANAAN TEMATIK DAN PERENCANAAN THIS (Tematik, Holistik Integratif, dan Spasial) termasuk mencermati/mengantisipasi Peluang dan Tantangan global/regional. 5. Membuat Aturan Perundangan untuk menjadikan poin 3 diatas terwujud dan sesuai serta menjadi pedoman bagi seluruh PD di Kabupaten Pasuruan. 6. Digitalisasi yang berkelanjutan sebagai upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keseimbangan lingkungan/berkelanjutan, serta meminimalkan bahkan mengatasi kemiskinan/stunting/masalah social dan pendidikan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, termasuk meningkatkan peran serta stakeholder dan sasaran pelayanan BAPPELITBANGDA dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing.
<ol style="list-style-type: none"> 3) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Harusnya Bernilai Lebih Atau Berkualitas Dan Berdaya Saing Sebagai Dokumen Penting Yang Diamanatkan Dalam Peraturan Dan Menjadi Pijakan/Acuan Dari Seluruh Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis Maupun Perencanaan Sectoral PD Yang Ada Di Kabupaten Pasuruan. 4) Pendekatan Perencanaan Tematik Dan/Atau This (Tematik Holistik Integratif Dan Spasial) Secara Digital Adalah Metode Penyusunan Dan Output Perencanaan Yang Mendukung Kearah Proses Perencanaan Dan Output Perencanaan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Dan Konsep Ini Sudah Diaplikasikan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Program Dak Tematik. 	



Issue Strategis	Solusi
	7. Kajian Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan diarahkan untuk benar benar menjadi pendukung/pengontrol/ pengendali terhadap ketercapaian indicator tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan merujuk pada sasaran daerah yang tertuang pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026 yaitu:

Tujuan RPD : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran RPD : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Indikator : Nilai SAKIP

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/ sasaran Jangka menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Indikator tujuan/ sasaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran OPD	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24,17	24,54	24,92	25,30	25,69	
			Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	24,26	24,54	24,82	25,11	25,40	
		Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif	Indikator 1.a Tingkat keselarasan aspirasi masyarakat dengan tema/arah kebijakan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
			Indikator 1.b: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran OPD 2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Indikator 1c Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah			100%	100%	100%
			Indikator 1d Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	36,61	-	36,80%	36,90%	40%
			Indikator 1e Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah		-	100%	100%	100%
		Sasaran 2: Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD		-	100%	100%	100%
		Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,78	85	86	87	88

Adapun Definisi operasional dari Indikator Tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula/Penjelasan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Hasil Evaluasi SAKIP-RB oleh Kemenpan – RB
Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif	Tingkat keselarasan aspirasi masyarakat dengan tema/arah kebijakan pembangunan daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat dan pokir sesuai kamus PD}}{\text{Jumlah seluruh usulan masyarakat dan pokir}} \times 100\%$ Kamus PD : - Kesesuaian dg tema & prioritas pembangunan - Membuat kertas kerja kamus oleh Bappelitbangda - Kriteria teknis usulan (sesuai perbub 117, proposal)
	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$ Penjelasan : 1. Keselarasan Renstra-RPJMD= (jumlah nilai a s/d d) (0,5) a. Keselarasan Sasaran RPJMD-Tujuan Renstra=(nilai max 1) (0,25) b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25) c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25) d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25) 2. Keselarasan Renja-RKPD =(jumlah nilai a s/d c) (0,5)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formula/Penjelasan
		a. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,3) b. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,4) c. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,3)
	Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah Capaian masing - masing IKU dan IKD}}{\text{Jumlah capaian seluruh IKU dan IKD}} \times 100\%$ Penjelasan : Capaian = perbandingan Realisasi kinerja dengan Target IKU dan IKD (IKK) sesuai dengan RPJMD Target IKU (IKK) sesuai PK Realisasi IKU (IKK) sesuai LKJIP Pemda Target IKD (IKK) sesuai RKPd Realisasi IKD (IKK) sesuai LKJIP PD
	Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	$\frac{\text{Jumlah IKU dan IKD yg tidak mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh IKU dan IKD}} \times 100\%$ Penjelasan : Target IKU dan IKD (IKK) sesuai RKPd dan P RKPd Tingkat Keselarasan - Nilai 1+ Nilai 1)* 100%
	Tingkat keselarasan antar dokrenda	1. Keselarasan RPJPD-RPJMD (0,5) a. Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD-Visi/Misi RPJMD=(nilai max 1) (1) 2. Keselarasan RPJMD-RKPd (0,5) a. Arah Kebijakan RPJMD-Tema RKPd=(nilai max 1) (0,25) b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25) c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25) d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25) Tingkat Keselarasan = (Nilai-1 + Nilai-2) *100%
Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Daerah yang mendukung IKU & IKD}}{\text{Jumlah Inovasi Daerah seluruhnya}} \times 100\%$ Penjelasan : Inovasi yang masuk dalam SK Bupati
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Komponen yg dinilai : 1. Perencanaan Kinerja (30) 2. Pengukuran Kinerja (30) 3. Pelaporan Kinerja (15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)

4.2 Program BAPPELITBANGDA Sesuai Sasaran RPD 2024-2026

Tabel 4.2

Program Sesuai Sasaran

Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif

Indikator Ia : Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya keselarasan dokrenda dengan dokren PD Bidang PPM	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pemb daerah	<p>1. Keselarasan Renstra-RPJMD = (jumlah nilai a s/d d) (0,5)</p> <p>a. Keselarasan Sasaran RPJMD-Tujuan Renstra=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>2. Keselarasan RKPd-Renja=(jumlah nilai a s/d c) (0,5)</p> <p>a. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,3)</p> <p>b. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,4)</p> <p>c. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,3)</p> <p>Perhitungan =</p> $\frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD Bid. PPM}}{\text{Jumlah seluruh PD Bid. PPM}} \times 100\%$
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	<p>a. Konsistensi Tujuan/Sasaran Renstra - Tujuan/Sasaran Renja Bid. PPM (nilai max 1) (0,25)</p> <p>b. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>c. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>d. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>Perhitungan =</p> $\frac{\text{Jumlah (Nilai - a sd Nilai - d) masing - masing PD Bid. PPM}}{\text{Jumlah seluruh PD Bid. PPM}} \times 100\%$
	Meningkatnya keselarasan dokrenda dengan dokren PD Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan dengan dok perencanaan pembangunan daerah	<p>1. Keselarasan Renstra-RPJMD = (jumlah nilai a s/d d) (0,5)</p> <p>a. Keselarasan Sasaran RPJMD-Tujuan Renstra=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>b. Konsistensi Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>c. Konsistensi IK Program=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>d. Konsistensi Target IK Program (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>2. Keselarasan Renja-RKPd =(jumlah nilai a s/d c) (0,5)</p> <p>a. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,3)</p> <p>b. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,4)</p> <p>c. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,3)</p> <p>Tingkat Keselarasan =</p> $\frac{\text{Jumlah (Nilai - 1 + Nilai - 2) masing - masing PD Bid. PERSIK}}{\text{Jumlah seluruh PD Bid. PERSIK}} \times 100\%$
		Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	<p>a. Konsistensi Tujuan/Sasaran Renstra - Tujuan/Sasaran Renja Bid. PERSIK (nilai max 1) (0,25)</p> <p>b. Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>c. Konsistensi IK Program/Kegiatan/Subkegiatan=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>d. Konsistensi Target IK Program/Kegiatan/ Subkegiatan (u/ th ke-1, th berikutnya mengacu realisasi th sebelumnya)=(nilai max 1) (0,25)</p> <p>Tingkat Keselarasan =</p> $\frac{\text{Jumlah (Nilai - a sd Nilai - d) masing - masing PD Bid. PERSIK}}{\text{Jumlah seluruh PD Bid. PERSIK}} \times 100\%$

Tabel 4.3

Program Sesuai Sasaran

Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif

Indikator :**1.a :** Tingkat keselarasan aspirasi masyarakat dengan tema/arah kebijakan pembangunan daerah**1.c :** Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah.**1.d :** Tingkat capaian IKU yang tidak memenuhi target**1.e :** Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya peran masyarakat dalam perencanaan	Persentase usulan stakeholder yg diakomodir dalam dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jml usulan stakeholder yg diakomodir}}{\text{Jml seluruh usulan stakeholder}} \times 100\%$
	Meningkatnya Hasil Evaluasi Perencanaan	Persentase IKU & IKD yang mencapai target	$\frac{\text{Jml IKU \& IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh IKU dan IKD}} \times 100\%$
		Persentase IKU & IKD yang tidak mencapai target	$\frac{\text{Jml IKU \& IKD yang tdk mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh IKU dan IKD}} \times 100\%$
	Meningkatnya Hasil Pengendalian Perencanaan	Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	<p>a. Keselarasan bab gambaran umum daerah – bab permasalahan dan isu strategis = (nilai max 1) (0,4)</p> <p>b. Keselarasan bab gambaran umum daerah – bab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah = (nilai max 1) (0,3)</p> <p>c. Keselarasan bab permasalahan/isu strategis – bab tujuan/sasaran/prioritas pembangunan daerah = (nilai max 1) (0,3)</p> <p>Perhitungan: $\frac{\text{Jml (Nilai - a sd Nilai - c) setiap Dokrenda}}{\text{Jml dokrenda yg sedang disusun th berkenaan}} \times 100\%$</p> <p>Jenis dokrenda: RPJPD/RPJMD/RKPD</p>

Tabel 4.4

Program, Kegiatan, Sesuai Sasaran

Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja Pembangunan daerah

Indikator 2 : Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKD

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya penerapan hasil riset dan inovasi	Persentase hasil riset yang diterapkan	$\frac{\text{Jml RTL Riset yg diterapkan mulai th dasar + 1}}{\text{Jml seluruh RTL Riset yg disusun mulai th dasar}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Tahun dasar penyusunan riset = 2023 Hasil riset yang sudah diterapkan (dalam Renja/DPA yg mengacu pada RTL yg disusun.</p>
		Tingkat kematangan inovasi daerah	$\frac{\text{Jml nilai kematangan semua inovasi daerah}}{\text{Jumlah semua Inovasi daerah}} \times 100\%$ <p>Nilai kematangan diperoleh dari aplikasi IGA</p>

Tabel 4.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sesuai Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator 3 : Nilai SAKIP OPD

Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	$\frac{\text{Jml bin layanan admpekrkantor andim 1 thn} \times 100 + (\% \text{jml dok perencanaan tpt wkt}) + \text{Jml dok Pelaporan} + (\% \text{jml aset kondisi baik}) + (\% \text{jml realisasi pegawai yg mengikuti diklat})}{5} \times 100\%$

BAPPELITBANGDA berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui proses Musrenbang yang telah dipermudah dengan adanya aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui aplikasi tersebut sejak tahun 2020. BAPPELITBANGDA juga melaksanakan pengendalian dan pelaporan melalui aplikasi SIMONEVA sejak tahun 2009.

Pada awal tahun 2017 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow problem. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui BAPPELITBANGDA juga akan menjamin terwujudnya money follow problem melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.

4.2 Cascading Kinerja BAPPELITBANGDA

Tabel 4.6
Cascading Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BAPPELITBANGDA
TAHUN 2024-2026

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
	Tujuan : Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran			24,92	25,30	25,69
	Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif	Indikator 1a : Tingkat keselarasan aspirasi masyarakat dengan tema/arah kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pemb daerah	24,82	25,11	25,40
				Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM			
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD bid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan dengan dok perencanaan pembangunan daerah			
				Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSEK			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang PPM yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			



No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Pemerintahan				
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yg menindaklanjuti hasil asistensi dan money			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan			

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Perekonomian	Renstra/Renja Bidang Perekonomian			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			



No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			
		Indikator 1.b: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan stakeholder yg diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%
		Indikator 1c Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah		Persentase IKU & IKD yang mencapai target	100%	100%	100%
		Indikator 1d Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target		Persentase IKU & IKD yang tidak mencapai target	36,8%	36,9%	40%
		Indikator 1e Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah		Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan			

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Pembangunan Perangkat Daerah	Informasi			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva			
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
			Koordinasi, Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu			
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
	Sasaran 2: Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKU dan IKD	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil riset yang diterapkan	100%	100%	100%
				Tingkat kematangan inovasi daerah	70%	75%	80%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bid Ekonomi dan Pembangunan			

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial			
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi			
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi			
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang diterapkan			
	Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	100%	100%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi			

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Kuangan SKPD	Kuangan SKPD			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola			
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase jasa penunjang operasional			

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Tahun		
					2024	2025	2026
			Pemerintahan Daerah	kantor yang tersedia			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappelitangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPELITBANGDA, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Perencanaan pengukuran SAKIP dan	Terwujudnya perencanaan pembangunan partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, implementatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ▪ Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan yang terintegrasi ▪ Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja ▪ Tervalidasinya data dan informasi untuk perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan ▪ Pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial ▪ Penggunaan hasil dari pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pembangunan daerah	
	Meningkatnya Inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan jumlah inovasi daerah▪ Peningkatan jumlah kajian/ litbang yang menunjang Sasaran Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada intern PD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappelitbangda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program prioritas. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Untuk agenda Perencanaan Pembangunan Tahun 2024-2026 diuraikan dalam table 6.1

Tabel 6.1
Agenda Perencanaan pembangunan Tahun 2024-2026

No	Dokumen Perencanaan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	RPJPD	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Publik RPJPD2. Rancangan RPJPD 2025-20453. Musrenbang RPJPD4. Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Propinsi2. Penetapan Perda RPJPD Tahun 2025-2045	
2.	RPD/ RPJMD	<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan Penyusunan RPJMD 2025-20302. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-20303. Penyempurnaan Rancangan Teknokratik menjadi Rancwal berdasarkan Visi Misi KDH Terpilih	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rancangan RPJMD2. Musrenbang RPJMD3. Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-20304. Penetapan Perda RPJMD 2025-2030	
3.	RKPD	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Publik RKPD 20252. Ranwal RKPD 20253. Musrenbang RKPD 20254. Rancangan Akhir RKPD 20255. Penetapan RKPD 20256. P RKPD 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi Publik RKPD 20262. Ranwal RKPD 20263. Musrenbang RKPD 20264. Rancangan Akhir RKPD 20265. Penetapan RKPD 20266. P RKPD 2025	

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024- 2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	point										
				Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	point										
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif			Indikator Ia : Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	n/a		100		100		100		100	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		n/a	*****	100	1.886.570.760	100	1.905.000.000	100	1.885.000.000	100	5.676.570.760
				Persentase keselarasan Dokrenda dengan Dokren PD Bidang PPM	%	n/a		100		100		100		100	
				Persentase keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	%	n/a		100		100		100		100	
				Persentase keselarasan Dokrenda dengan Dokren PD Bidang PERSIK	%	n/a		100		100		100		100	

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Persentase pelaksanaan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	%	n/a		100		100		100		100			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang PPM yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	%	n/a	800.000.000	100	810.000.000	100	820.000.000	100	810.000.000	100	2.440.000.000		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	35	108.010.400	35	108.010.400	35	108.010.400	35	108.010.400	35	324.031.200		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	34	55.750.200	34	55.750.200	34	55.750.200	34	55.750.200	34	167.250.600		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	34	137.172.900	34	107.172.900	34	107.172.900	34	107.172.900	34	321.518.700		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	34	-	34	35.000.000	34	35.000.000	34	35.000.000	34	105.000.000		

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	11	174.066.500	11	174.066.500	11	174.066.500	11	174.066.500	11	522.199.500
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	55.000.000	7	55.000.000	7	55.000.000	7	55.000.000	7	165.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	270.000.000	7	240.000.000	7	250.000.000	7	240.000.000	7	730.000.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	-	7	35.000.000	7	35.000.000	7	35.000.000	7	105.000.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yg menindaklanjuti hasil asistensi dan money	%	n/a	514.999.860	n/a	548.000.000	n/a	545.000.000	n/a	550.000.000	n/a	1.643.000.000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	6	128.908.130	6	128.000.000	6	125.000.000	6	125.000.000	6	378.000.000

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	50.013.660	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	150.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	48.772.980	5	50.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	140.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	-	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	90.000.000		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	3	175.637.550	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	525.000.000		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	44.185.360	3	35.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	110.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	67.482.180	3	45.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	145.000.000		

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	3	-	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	105.000.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yg menindaklanjuti hasil asistensi dan monev	%	n/a	448.571.000	n/a	528.570.760	n/a	540.000.000	n/a	525.000.000	n/a	1.593.570.760
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	7	205.429.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	600.000.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	28.322.400	5	32.570.760	5	35.000.000	5	35.000.000	5	102.570.760
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	61.574.400	5	70.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	200.000.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	75.000.000

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	118.974.100	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	360.000.000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	10.072.200	2	11.000.000	2	25.000.000	2	10.000.000	2	46.000.000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	24.198.900	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	105.000.000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	-	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	105.000.000
				Indikator Ia : Tingkat keselarasan aspirasi masyarakat dengan tema/arah kebijakan pembangunan daerah	%	n/a	n/a	100		100	-	100	-	100	-
				Indikator 1c Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	%	n/a	n/a	100		100	-	100			
				Indikator 1d Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	%	n/a	n/a	100		100	-	100			

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
				Indikator 1e Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah													
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% stakeholder yg memberikan masukan/saran	%	n/a	1.960.000.000	100	2.285.000.000	100	2.312.000.000	100	2.320.000.000	100	6.917.000.000		
				% IKD dan IKU yang mencapai target	%	n/a		85	-	90	-	95	-	95	-		
				% IKD dan IKU yang mencapai target													
				Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	n/a		100	-	100	-	100	-	100	-		
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data gambaran umum daerah yang dapat dianalisis	%	100	50.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	135.000.000	100	395.000.000		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	masukan	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	170.000.000		
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	0		56	75.000.000	56	75.000.000	56	75.000.000	168	225.000.000		

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jenis data/informasi yang terisi pada aplikasi Simoneva	%	100	210.000.000	100	210.000.000	100	212.000.000	100	215.000.000	100	637.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	5	160.000.000	5	480.000.000
			Koordinasi, Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	50.000.000	6	50.000.000	6	52.000.000	6	55.000.000	6	157.000.000
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	%	n/a	n/a	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu	%	100	1.700.000.000	100	1.895.000.000	100	1.920.000.000	100	1.920.000.000	100	5.735.000.000
				Persentase kehadiran masyarakat dalam penyusunan perencanaan	%	100		100		100		100		100	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	345.000.000

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	56	250.000.000	56	250.000.000	56	250.000.000	56	250.000.000	56	750.000.000		
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	535.000.000	2	550.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	1.750.000.000		
			Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	6060	50.000.000	6060	55.000.000	6060	55.000.000	6060	55.000.000	6060	165.000.000		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	4	750.000.000	4	925.000.000	4	900.000.000	4	900.000.000	4	2.725.000.000		
				Indikator 2 : Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKD	%												
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil riset yang diterapkan	%	n/a	2.373.400.000	100	1.873.250.000	100	2.023.025.000	100	2.140.426.250	100	6.036.701.250		
				Tingkat kematangan inovasi daerah	%	n/a		75		80		85		85			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	n/a	670.200.000										
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	rekomendasi dan dokumen	2	670.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-		

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bid Ekonomi dan Pembangunan	%	100	490.000.000	100	598.250.000	100	648.025.000	100	680.426.250	100	1.926.701.250
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dokumen	4	490.000.000	4	598.250.000	4	648.025.000	4	680.426.250	4	1.926.701.250
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	665.000.000	100	725.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	2.425.000.000
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	dokumen	4	665.000.000	4	725.000.000	4	800.000.000	4	900.000.000	4	2.425.000.000
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi	%	100	548.200.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	560.000.000	100	1.685.000.000
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	kegiatan	3	292.000.000	3	300.000.000	3	325.000.000	3	300.000.000	3	925.000.000
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	2	256.200.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	2	760.000.000
				Indikator : Nilai SAKIP OPD	poin	85		86		87		88		88	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	%	100	8.228.512.855	100	8.280.662.955	100	8.085.458.715	100	7.980.057.465	100	*****

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	%		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		126.000.000		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit	8	42.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000	8	126.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%	100	407.700.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	390.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	25	407.700.000	25	130.000.000	25	130.000.000	25	130.000.000	25	390.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	%	100	6.056.435.855	100	6.056.435.855	100	6.056.435.855	100	6.056.435.855	100	18.169.307.565		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	532	5.596.137.359	532	5.596.137.359	532	5.596.137.359	532	5.596.137.359	532	16.788.412.077		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	374.918.496	12	374.918.496	12	374.918.496	12	374.918.496	12	1.124.755.488		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	85.380.000	12	85.380.000	12	85.380.000	12	85.380.000	12	256.140.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%	100	737.035.000	100	790.000.000	100	803.000.000	100	716.000.000	100	2.309.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	38.359.000	12	40.000.000	12	41.000.000	12	41.000.000	12	122.000.000		

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	62.328.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	195.000.000		
			Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	96.152.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	9.692.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	442.504.000	45	500.000.000	45	587.000.000	45	500.000.000	45	1.587.000.000		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	dokumen	1	88.000.000	1	75.000.000	1	-	1	-	1	75.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	%	100	371.880.200	100	378.000.000	100	379.000.000	100	380.000.000	100	1.137.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20	266.748.900	20	270.000.000	20	270.000.000	20	270.000.000	20	810.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20	27.230.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	90.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	83	77.901.300	83	78.000.000	83	79.000.000	83	80.000.000	83	237.000.000		

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Setuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026	
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%	100	163.078.000	100	390.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	720.000.000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	0	225.000.000	0	-	0	-	0	225.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	25	163.078.000	25	165.000.000	25	165.000.000	25	165.000.000	25	495.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%	100	194.910.000	100	195.227.100	100	194.910.000	100	194.910.000	100	585.047.100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	170.910.000	12	171.227.100	12	170.910.000	12	170.910.000	12	513.047.100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	72.000.000
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	%	100	255.473.800	100	299.000.000	100	315.112.860	100	295.711.610	100	909.824.470
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	dokumen	6	106.888.800	6	125.000.000	6	125.000.000	6	125.000.000	6	375.000.000

RENSTRA BAPPELITBANGDA
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Keg, Sub Keg	Satuan	Data Capaian pd tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra	
						2023		2024		2025		2026		2026			
						T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	96.600.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	108.435.625	2	328.435.625		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	51.985.000	2	74.000.000	2	70.112.860	2	62.275.985	2	206.388.845		
JUMLAH							14.325.483.715		14.325.483.715		14.325.483.715		14.325.483.715		42.976.451.145		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2024-2026.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 7.1 dan Tabel 7.1 Program yang mendukung pencapaian Indikator RPD, sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan mengacu pada Tujuan Sasaran RPD

No	Sasaran PD/ IKU PD	Indikator Kinerja Sasaran PD/IKU PD	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD 2022	Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2024-2026)
					2023	2024	2026	2026	
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yg partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan implementatif	Tingkat keselarasan aspirasi masyarakat dengan tema/arah kebijakan pembangunan daerah	%	-	-	100	100	100	100
		Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	100	100	100	100
		Tingkat capaian IKU dan Indikator Kinerja Daerah	%	-	-	100	100	100	100
		Persentase IKU dan IKD yang tidak mencapai target	%	-	-	100	100	100	100

No	Sasaran PD/ IKU PD	Indikator Kinerja Sasaran PD/IKU PD	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD 2022	Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2024-2026)
					2023	2024	2026	2026	
2	Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan inovasi daerah dengan IKD	%	-	-	75	75	80	80
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	point	84,78	85	86	87	88	88

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Program	Sasaran/ Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Periode RPD 2022	Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pad Akhir Periode RPD (2024-2026)
					2023	2024	2026	2026	
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya keselarasan dokrenda dengan dokren PD dan Bidang PPM	Tingkat keselarasan Dokrenda dengan Dokren PD Bidang PPM	-	-	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PPM	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya keselarasan dokrenda dengan dokren PD Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan	Tingkat keselarasan Dokrenda dengan Dokren PD Bidang PERSIK	-	-	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra-Renja PD Bidang PERSIK	-	-	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya peran masyarakat dalam perencanaan	% stakeholder yg memberikan masukan/saran	-	-	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Hasil Evaluasi Perencanaan	% IKU IKD yang mencapai target	-	-	100%	100%	100%
		% IKU IKD yang tidak mencapai target				36,16	40%	45%	45%
		Meningkatnya Hasil Pengendalian Perencanaan	Tingkat keselarasan antar bagian dokrenda	-	-	100%	100%	100%	100%

No	Program	Sasaran/ Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Periode RPD 2022	Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2024-2026)
					2023	2024	2026	2026	
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya penerapan hasil riset dan inovasi	Persentase hasil riset yang diterapkan	-	-	100%	100%	100%	100%
			Tingkat kematangan inovasi daerah	-	-	75%	80%	85%	85%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	-	-	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan sebelumnya.

Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 3 (tiga) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPD 2023-2026 sesuai ketugasan dan fungsi BAPPELITBANGDA. Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2023-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan BAPPELITBANGDA dan menjadi pedoman bagi BAPPELITBANGDA untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa

mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Demikian rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 11 April 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF